

## School Digitalization Policy in Banyuwangi: A Literature-Based Analysis of Its Effectiveness in Addressing Digital Inequality

Safarotul Jannah, Llidia Astuti, Nur Anim Jauhariyah  
Program Studi S2 Manajemen Pendidikan Islam,  
Pascasarjana Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung Banyuwangi Indonesia  
Email. [safarotulj@gmail.com](mailto:safarotulj@gmail.com), [lidiaastuti7988@gmail.com](mailto:lidiaastuti7988@gmail.com),  
[animjauhariyah@gmail.com](mailto:animjauhariyah@gmail.com)

### ABSTRACT

Digital transformation in the education sector is the Indonesian government's strategic agenda in responding to learning challenges in the technological and post-pandemic era. Banyuwangi Regency, as one of the regions that is actively encouraging the digitalization of public services, is also implementing school digitalization policies through the use of online learning platforms, Learning Management Systems (LMS), and various digital education applications. However, the implementation of this policy has given rise to academic debate regarding its effectiveness in reducing inequality in access to digital learning between schools. This research aims to critically analyze the effectiveness of school digitalization policies in Banyuwangi in overcoming digital inequality through a literature review approach. The research method used is a literature study by examining national and international journal articles, government policy documents, institutional reports, and online publications that are relevant to the topic of educational digitalization and the digital divide. The results of the study show that school digitalization policies have great potential in increasing learning flexibility and educational management efficiency, but are not yet fully able to overcome digital inequality due to differences in infrastructure, teachers' digital literacy capacity, and students' socio-economic readiness. Therefore, a more inclusive and sustainable policy strategy is needed so that the digitalization of education is not only a symbol of modernization, but also a means of equal access and justice to education.

**Keywords** : School Digitalization, Education Policy, Digital Inequality, Online Learning, Banyuwangi

## **Kebijakan Digitalisasi Sekolah di Banyuwangi: Analisis Berbasis Kajian Literatur Terhadap Efektivitasnya dalam Mengatasi ketimpangan Digital**

**Safarotul Jannah, Lidia Astuti, Nur anim Jauhariyah**

Program Studi S2 Manajemen Pendidikan Islam, Pascasarjana Universitas KH.

Mukhtar Syafaat Blokagung Banyuwangi Indonesia

Email. [safarotulj@gmail.com](mailto:safarotulj@gmail.com), [lidiaastuti7988@gmail.com](mailto:lidiaastuti7988@gmail.com),

[animjauhariyah@gmail.com](mailto:animjauhariyah@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Transformasi digital dalam sektor pendidikan merupakan agenda strategis pemerintah Indonesia dalam menjawab tantangan pembelajaran di era teknologi dan pascapandemi. Kabupaten Banyuwangi sebagai salah satu daerah yang aktif mendorong digitalisasi layanan publik turut mengimplementasikan kebijakan digitalisasi sekolah melalui pemanfaatan platform pembelajaran daring, Learning Management System (LMS), dan berbagai aplikasi pendidikan digital. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut memunculkan perdebatan akademik terkait efektivitasnya dalam mengurangi ketimpangan akses pembelajaran digital antar sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis efektivitas kebijakan digitalisasi sekolah di Banyuwangi dalam mengatasi ketimpangan digital melalui pendekatan kajian literatur. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan menelaah artikel jurnal nasional dan internasional, dokumen kebijakan pemerintah, laporan institusional, serta publikasi daring yang relevan dengan topik digitalisasi pendidikan dan kesenjangan digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan digitalisasi sekolah memiliki potensi besar dalam meningkatkan fleksibilitas pembelajaran dan efisiensi manajemen pendidikan, namun belum sepenuhnya mampu mengatasi ketimpangan digital akibat perbedaan infrastruktur, kapasitas literasi digital guru, serta kesiapan sosial-ekonomi peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan strategi kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan agar digitalisasi pendidikan tidak hanya menjadi simbol modernisasi, tetapi juga sarana pemerataan akses dan keadilan pendidikan.

**Kata Kunci :** Digitalisasi Sekolah, Kebijakan Pendidikan, Ketimpangan Digital, Pembelajaran Daring, Banyuwangi

## Pendahuluan

Transformasi digital dalam bidang pendidikan telah menjadi fenomena global yang tidak terpisahkan dari dinamika perkembangan teknologi informasi dan komunikasi<sup>1</sup>. Digitalisasi pendidikan dipandang sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, memperluas akses terhadap sumber belajar, serta mendorong efisiensi tata kelola pendidikan. Berbagai studi internasional menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital mampu mendukung pembelajaran yang lebih fleksibel, kolaboratif, dan berpusat pada peserta didik<sup>2</sup>. Laporan UNESCO dan OECD menegaskan bahwa integrasi teknologi digital berkontribusi pada penguatan kompetensi abad ke-21, seperti literasi digital, berpikir kritis, dan kemampuan pemecahan masalah<sup>3</sup>. Dengan demikian, digitalisasi pendidikan bukan sekadar tren teknologis, melainkan bagian dari agenda strategis reformasi pendidikan modern<sup>4</sup>.

Di Indonesia, percepatan digitalisasi pendidikan semakin menguat sejak terjadinya pandemi COVID-19 yang memaksa lembaga pendidikan beradaptasi dengan pembelajaran jarak jauh<sup>5</sup>. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk mengakselerasi pemanfaatan platform pembelajaran daring dan Learning Management System (LMS) sebagai solusi keberlanjutan pendidikan. Pembelajaran konvensional yang sepenuhnya bergantung pada tatap muka terbukti rentan terhadap disrupsi, sehingga diperlukan sistem pembelajaran yang adaptif dan berbasis teknologi. Kebijakan nasional seperti Merdeka Belajar, pengembangan platform digital pendidikan, serta perluasan infrastruktur TIK menjadi indikator komitmen pemerintah dalam mendorong transformasi digital pendidikan. Oleh karena itu, digitalisasi pendidikan di Indonesia berkembang sebagai respons struktural terhadap tantangan krisis sekaligus peluang inovasi pembelajaran<sup>6</sup>.

Pada tingkat daerah, Kabupaten Banyuwangi dikenal sebagai salah satu wilayah yang relatif progresif dalam mengimplementasikan digitalisasi layanan publik, termasuk di sektor pendidikan. Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi mendorong sekolah untuk mengadopsi berbagai teknologi digital, seperti Google Classroom, sistem e-learning sekolah, serta ujian

---

<sup>1</sup> Mohamed Ashmel Mohamed Hashim, Issam Tlemsani, and Robin Matthews, 'Higher Education Strategy in Digital Transformation', *Education and Information Technologies*, 27.3 (2022), pp. 3171–95.

<sup>2</sup> Shelly D M Sumual, Julisa R Sambur, and Marcela Magnolia Tamtompol, 'Analisis Infrastruktur TIK Dalam Mendukung Transformasi Digital Di Satuan Pendidikan', *EduTik: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 5.6 (2025), pp. 2463–70.

<sup>3</sup> Mujiono Sang Putra, 'Transformasi Pendidikan Di Era Digital Solusi Kreatif Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran', *JPSL: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Lingkungan*, 3.2 (2025), pp. 68–78.

<sup>4</sup> Eka Prihatin, Deni Kadarsah, and Ratu Dintha IZFS, *Kebijakan Pendidikan Nasional: Transformasi Digital Untuk Sistem Yang Inklusif* (Indonesia Emas Group, 2025).

<sup>5</sup> Edi Irawan and others, *Pendidikan Tinggi Di Masa Pandemi: Transformasi, Adaptasi, Dan Metamorfosis Menyongsong New Normal* (Zahir Publishing, 2020).

<sup>6</sup> Prihatin, Kadarsah, and IZFS.

berbasis komputer<sup>7</sup>. Kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, efisiensi administrasi pendidikan, serta daya saing sumber daya manusia daerah. Berbagai program digitalisasi yang dijalankan Banyuwangi sering dijadikan rujukan praktik baik (*best practice*) dalam inovasi pelayanan publik berbasis teknologi. Dengan demikian, Banyuwangi menjadi konteks empiris yang relevan untuk mengkaji implementasi kebijakan digitalisasi pendidikan di tingkat lokal<sup>8</sup>.

Meskipun demikian, literatur akademik menunjukkan bahwa digitalisasi pendidikan tidak selalu menghasilkan dampak yang merata bagi seluruh satuan pendidikan. Ketimpangan digital masih menjadi persoalan struktural yang mengiringi implementasi pembelajaran daring<sup>9</sup>. Perbedaan ketersediaan infrastruktur teknologi, kualitas jaringan internet, kompetensi literasi digital guru, serta kondisi sosial-ekonomi peserta didik memengaruhi efektivitas pemanfaatan teknologi pendidikan. Sejumlah penelitian menegaskan bahwa sekolah di wilayah perkotaan cenderung lebih siap dibandingkan sekolah di wilayah pinggiran atau pedesaan dalam mengadopsi pembelajaran digital. Oleh karena itu, digitalisasi pendidikan berpotensi memperlebar kesenjangan apabila tidak disertai kebijakan pendukung yang berkeadilan<sup>10</sup>.

Dalam konteks Kabupaten Banyuwangi, tantangan ketimpangan digital menjadi isu krusial dalam pelaksanaan kebijakan digitalisasi sekolah. Kebijakan yang diterapkan secara seragam berpotensi menghasilkan dampak yang berbeda antar sekolah dengan tingkat kesiapan yang beragam<sup>11</sup>. Sekolah dengan infrastruktur dan sumber daya manusia yang terbatas menghadapi hambatan dalam mengoptimalkan platform digital yang disediakan. Temuan berbagai studi regional menunjukkan adanya disparitas pemanfaatan LMS dan pembelajaran daring antar sekolah, meskipun berada dalam satu wilayah administratif<sup>12</sup>. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai efektivitas kebijakan digitalisasi sekolah dalam mengurangi ketimpangan akses pembelajaran digital<sup>13</sup>.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan kajian akademik yang menelaah kebijakan digitalisasi sekolah secara kritis dengan menempatkan isu ketimpangan digital sebagai fokus utama analisis. Kajian

---

<sup>7</sup> Laila Kholid Alfrida and Dzunuwanus Ghulam Manar, 'Semua Berawal Dari It: Terobosan Banyuwangi Dalam Menata Ulang Tatakelola Pemerintahan', *Politika: Jurnal Ilmu Politik (SINTA 2)*, 2020.

<sup>8</sup> Ridha Ramadhany and others, *Transformasi Digital Sektor Publik* (Star Digital Publishing, 2025).

<sup>9</sup> Nadien Irfatin Nuha Gazali and Raden Bambang Sumarsono, 'Efektivitas Kebijakan Digitalisasi Dalam Mewujudkan Pembelajaran Berkualitas Di Era Society 5.0', *Proceedings Series of Educational Studies*, 2025.

<sup>10</sup> Loso Judijanto and others, *Transformasi Pendidikan: Menghadapi Era Digital Di Ruang Belajar* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

<sup>11</sup> Eka Prihatin and S Pd Sutangsa, *Transformasi Kebijakan Pendidikan: Dari Konsep Hingga Pelaksanaan Di Era Digital* (Indonesia Emas Group, 2025).

<sup>12</sup> Nurul Mawaddah and others, 'Optimalisasi Pembelajaran Daring Dalam Meningkatkan Akses Pendidikan Di Daerah Terpencil', *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8.2 (2025), pp. 1399–1408.

<sup>13</sup> Irawan and others.

literatur dipandang sebagai pendekatan yang relevan untuk memetakan perkembangan wacana, temuan empiris, serta perdebatan konseptual terkait digitalisasi pendidikan. Melalui sintesis berbagai sumber ilmiah dan dokumen kebijakan, kajian literatur memungkinkan analisis yang komprehensif tanpa terbatas pada satu konteks empiris tunggal. Pendekatan ini banyak digunakan dalam studi kebijakan pendidikan untuk mengevaluasi efektivitas program dan implikasi implementasinya. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk memberikan pemahaman konseptual dan kritis mengenai efektivitas kebijakan digitalisasi sekolah di Banyuwangi dalam menjawab tantangan ketimpangan digital

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur (*literature review*) untuk menganalisis secara kritis kebijakan digitalisasi sekolah dalam mengatasi ketimpangan digital pendidikan, khususnya dalam konteks Kabupaten Banyuwangi. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara mendalam berbagai temuan empiris, konsep teoretis, serta kerangka kebijakan yang berkembang terkait digitalisasi pendidikan dan kesenjangan akses pembelajaran daring, baik pada level nasional maupun internasional.

Sumber data penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi, dokumen kebijakan pemerintah, laporan institusional, serta publikasi daring resmi yang relevan dengan topik digitalisasi pendidikan dan ketimpangan digital. Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data ilmiah seperti Google Scholar, DOAJ, SINTA, dan Scopus, dengan menggunakan kata kunci antara lain *digitalisasi pendidikan*, *digital divide*, *kebijakan pendidikan digital*, *pembelajaran daring*, dan *Learning Management System*. Artikel yang ditelaah dibatasi pada publikasi dalam rentang 10 tahun terakhir guna menjamin relevansi dan aktualitas data.

Proses seleksi literatur dilakukan secara sistematis dengan menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi meliputi: (1) artikel yang membahas digitalisasi pendidikan atau kebijakan pembelajaran daring, (2) studi yang menyoroti isu kesenjangan digital, dan (3) publikasi yang memiliki relevansi dengan konteks pendidikan formal. Adapun kriteria eksklusi mencakup artikel yang bersifat opini non-ilmiah, publikasi tanpa proses penelaahan sejawat (*peer-reviewed*), serta sumber yang tidak menyediakan informasi metodologis yang jelas. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa literatur yang dianalisis memiliki kualitas akademik dan kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik (*thematic analysis*) dengan tahapan: (1) pengelompokan literatur berdasarkan tema utama, seperti kebijakan digitalisasi, kesiapan infrastruktur, literasi digital, dan ketimpangan akses; (2) identifikasi pola dan kecenderungan temuan antar studi;

serta (3) interpretasi kritis terhadap hubungan antara kebijakan digitalisasi sekolah dan dampaknya terhadap ketimpangan digital. Analisis ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis-kritis dengan membandingkan berbagai perspektif dan hasil penelitian sebelumnya<sup>14</sup>.

Untuk menjaga keabsahan dan keandalan data, penelitian ini mengutamakan penggunaan sumber yang berasal dari jurnal bereputasi dan dokumen resmi pemerintah. Selain itu, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan temuan dari berbagai jenis publikasi guna meminimalkan bias dan meningkatkan kredibilitas hasil kajian. Dengan prosedur tersebut, metode penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan sintesis literatur yang komprehensif dan argumentatif sebagai dasar analisis efektivitas kebijakan digitalisasi sekolah dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan.

## **Pembahasan**

### **Kebijakan Digitalisasi Sekolah sebagai Agenda Transformasi Pendidikan**

Kebijakan digitalisasi sekolah secara konseptual merupakan bagian dari agenda transformasi pendidikan yang berorientasi pada peningkatan kualitas, relevansi, dan daya saing sistem pendidikan di era digital. Transformasi ini menuntut perubahan paradigma pembelajaran dari model konvensional menuju pembelajaran yang fleksibel, kolaboratif, dan berpusat pada peserta didik dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Berbagai kajian literatur menegaskan bahwa pemanfaatan Learning Management System (LMS), platform pembelajaran daring, dan asesmen digital mampu memperluas ruang belajar lintas waktu dan tempat, serta membuka akses terhadap sumber belajar yang lebih beragam dan. Dengan demikian, digitalisasi sekolah diposisikan sebagai fondasi strategis dalam reformasi sistem pendidikan modern<sup>15</sup>.

Dalam perspektif teori transformasi pendidikan, digitalisasi sekolah tidak dipahami sebagai inovasi teknis semata, melainkan sebagai proses perubahan sistemik yang menyentuh dimensi pedagogis, organisatoris, dan kultural. Teknologi berperan sebagai enabler yang memungkinkan terjadinya perubahan desain pembelajaran, relasi guru peserta didik, serta mekanisme evaluasi pembelajaran. Literatur internasional yang dirilis oleh UNESCO, OECD, dan World Bank menunjukkan bahwa transformasi digital pendidikan yang berhasil selalu ditopang oleh perubahan strategi pembelajaran dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, bukan sekadar penyediaan platform digital. Oleh karena itu, kebijakan digitalisasi sekolah harus dirancang sebagai agenda

---

<sup>14</sup> Yosep Dwi Kristanto and Russasmita Sri Padmi, 'Analisis Data Kualitatif: Penerapan Analisis Jejaring Untuk Analisis Tematik Yang Cepat, Transparan, Dan Teliti', 2020.

<sup>15</sup> Prihatin, Kadarsah, and IZFS.

perubahan sistem pendidikan secara menyeluruh<sup>16</sup>.

Kajian literatur juga menunjukkan bahwa kebijakan digitalisasi sekolah di berbagai negara umumnya diarahkan untuk menjawab tuntutan kompetensi abad ke-21, seperti berpikir kritis, literasi digital, kreativitas, dan. Tuntutan tersebut muncul seiring dengan perubahan karakter masyarakat dan dunia kerja yang semakin berbasis teknologi dan pengetahuan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa integrasi teknologi digital dalam pembelajaran berkontribusi positif terhadap penguatan kompetensi abad ke-21 apabila diiringi dengan pendekatan pedagogis yang tepat. Dengan demikian, digitalisasi sekolah memiliki legitimasi kuat sebagai instrumen strategis pengembangan sumber daya manusia masa depan<sup>17</sup>.

Dalam konteks Indonesia, kebijakan digitalisasi sekolah diperkuat melalui berbagai regulasi dan program nasional, seperti Merdeka Belajar dan pengembangan platform pembelajaran digital. Kebijakan tersebut bertujuan mendorong fleksibilitas pembelajaran, peningkatan kualitas guru, serta efisiensi tata kelola pendidikan<sup>18</sup>. Dokumen kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menunjukkan bahwa digitalisasi pendidikan diposisikan sebagai salah satu pilar utama reformasi pendidikan nasional. Oleh karena itu, implementasi digitalisasi sekolah di tingkat daerah perlu dipahami sebagai bagian dari agenda nasional transformasi pendidikan<sup>19</sup>.

Pada level daerah, Kabupaten Banyuwangi menunjukkan komitmen dalam mengimplementasikan kebijakan digitalisasi sekolah sejalan dengan agenda modernisasi layanan publik berbasis teknologi. Pemerintah daerah mendorong pemanfaatan Google Classroom, e-learning sekolah, serta ujian berbasis komputer sebagai bentuk adaptasi satuan pendidikan terhadap perubahan paradigma pembelajaran. Keberadaan berbagai platform digital yang digunakan oleh sekolah-sekolah di Banyuwangi menunjukkan adanya upaya sistematis untuk mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran dan evaluasi pendidikan. Dengan demikian, Banyuwangi menjadi konteks empiris yang relevan untuk mengkaji efektivitas kebijakan digitalisasi sekolah di tingkat lokal<sup>20</sup>.

Namun demikian, literatur secara konsisten menegaskan bahwa digitalisasi pendidikan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai proses adopsi teknologi. Keberhasilan transformasi digital sangat

---

<sup>16</sup> Siti Imroah, Atik Uminatur Rofi'ah, and Ima Royani, *Teori Inovasi Dalam Pendidikan* (PT Arr Rad Pratama, 2025).

<sup>17</sup> M Mansyur, *Pendidikan Menuju Era Society 5.0 Revolusi Digital Abad 21: Belajar Berpikir Kritis, Kreatif Dan Inovatif Membentuk Karakter Siswa* (Deepublish, 2025).

<sup>18</sup> Mohamad Mustari, *Manajemen Pendidikan Di Era Merdeka Belajar* (Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).

<sup>19</sup> dan teknologi riset, 'kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi', *universitas*, 1.1 (2022), p. 2.

<sup>20</sup> analisis model layanan terpadu l p ma, 'journal of scientech research and development', *journal of scientech research and development*, 7.1 (2025).

bergantung pada kesiapan ekosistem pendidikan secara menyeluruh, yang mencakup infrastruktur teknologi, literasi digital guru, akses peserta didik terhadap perangkat dan konektivitas, serta tata kelola kebijakan yang adaptif. Sejumlah studi menunjukkan bahwa kebijakan digitalisasi yang tidak disertai perencanaan komprehensif dan pendampingan berkelanjutan cenderung menghasilkan implementasi yang bersifat simbolik dan tidak berdampak signifikan terhadap kualitas maupun pemerataan pendidikan. Oleh karena itu, digitalisasi sekolah memerlukan pendekatan kebijakan yang holistik dan berkeadilan. Untuk memperjelas relasi antara tujuan kebijakan, instrumen digital, dan risiko implementasi, sintesis literatur dapat dirangkum dalam tabel konseptual sebagai berikut:

**Tabel 1. Sintesis Literatur Kebijakan Digitalisasi Sekolah**

Aspek	Tujuan Kebijakan	Instrumen Digital	Risiko Implementasi
Pembelajaran	Fleksibel & kolaboratif	LMS, e-learning	Guru belum siap digital
Akses	Pemerataan sumber belajar	Platform daring	Ketimpangan infrastruktur
Evaluasi	Efisiensi & akuntabilitas	Ujian berbasis komputer	Akses perangkat tidak merata
Tata kelola	Modernisasi pendidikan	Sistem informasi sekolah	Kebijakan simbolik

Tabel tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi sekolah merupakan kebijakan multidimensional yang memerlukan sinergi antar aspek teknis, pedagogis, dan kebijakan. Oleh karena itu, transformasi digital pendidikan harus dirancang secara inklusif agar mampu berfungsi sebagai instrumen peningkatan kualitas sekaligus pemerataan akses pendidikan.

### **Ketimpangan Digital Dalam Implementasi Pembelajaran Daring**

Ketimpangan digital merupakan salah satu isu struktural utama dalam implementasi pembelajaran daring di berbagai sistem pendidikan. Ketimpangan ini merujuk pada perbedaan akses, kemampuan, dan pemanfaatan teknologi digital antar kelompok, wilayah, maupun satuan pendidikan. Kajian literatur menunjukkan bahwa implementasi pembelajaran daring cenderung lebih efektif di sekolah yang memiliki infrastruktur teknologi memadai dan sumber daya manusia yang siap secara digital, sementara sekolah di wilayah pinggiran dan pedesaan menghadapi keterbatasan signifikan. Dengan demikian, pembelajaran daring berpotensi memperlebar kesenjangan pendidikan apabila tidak

diiringi dengan kebijakan yang berorientasi pada pemerataan<sup>21</sup>.

Secara teoretis, ketimpangan digital dalam pendidikan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan perangkat dan jaringan internet, tetapi juga mencakup dimensi literasi digital dan kesiapan pedagogis pendidik<sup>22</sup>. Teori digital divide<sup>23</sup> menegaskan adanya tiga lapisan kesenjangan, yaitu kesenjangan akses, kesenjangan kemampuan, dan kesenjangan pemanfaatan teknologi. Berbagai studi menunjukkan bahwa guru yang memiliki keterbatasan literasi digital cenderung menggunakan teknologi secara minimalis, sehingga potensi pembelajaran daring tidak dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, ketimpangan digital harus dipahami sebagai persoalan multidimensional yang memerlukan intervensi kebijakan komprehensif<sup>24</sup>.

Dalam konteks implementasi pembelajaran daring, ketimpangan digital tercermin dari perbedaan akses internet antar wilayah, ketersediaan perangkat teknologi di rumah peserta didik, serta dukungan lingkungan belajar. Wilayah perkotaan umumnya memiliki infrastruktur jaringan yang lebih stabil dibandingkan wilayah pedesaan atau daerah terpencil. Literatur nasional menunjukkan bahwa keterbatasan konektivitas dan perangkat menjadi faktor utama rendahnya partisipasi peserta didik dalam pembelajaran daring, terutama selama masa percepatan digitalisasi pendidikan. Kondisi ini menegaskan bahwa pembelajaran daring belum sepenuhnya inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat<sup>25</sup>.

Dalam konteks Kabupaten Banyuwangi, ketimpangan digital menjadi tantangan nyata dalam implementasi kebijakan digitalisasi sekolah. Meskipun pemerintah daerah mendorong pemanfaatan platform pembelajaran daring dan ujian berbasis komputer, tidak semua sekolah memiliki tingkat kesiapan yang setara. Sekolah yang berada di wilayah pusat kota cenderung lebih siap dari sisi infrastruktur dan kompetensi guru dibandingkan sekolah di wilayah pinggiran. Dengan demikian, kebijakan digitalisasi yang bersifat seragam berpotensi menghasilkan dampak yang tidak merata antar satuan pendidikan.

Oleh karena itu, diperlukan strategi kebijakan yang menargetkan faktor penyebab utama secara proporsional. Untuk memperjelas hubungan antara bentuk ketimpangan digital dan dampaknya terhadap pembelajaran daring, sintesis literatur dapat dirangkum dalam tabel berikut:

---

<sup>21</sup> Cendy Lestari and others, 'Kesenjangan Digital Dan Dampaknya Terhadap Pendidikan', *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 3.4 (2025), pp. 1–16.

<sup>22</sup> Hariyono Hariyono and others, *Literasi Digital Dan Media Dalam Dunia Pendidikan* (PT. Green Pustaka Indonesia, 2025).

<sup>23</sup> Jan Van Dijk, *The Digital Divide* (John Wiley & Sons, 2020).

<sup>24</sup> Wida Nurhidayah, Arie Rakhmat Riyadi, and Neni Maulidah, 'Pemahaman Literasi Digital Guru Dan Implikasinya Dalam Pembelajaran Berdiferensiasi', *Elementary Journal: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 8.1 (2025), pp. 222–28.

<sup>25</sup> Rizki Ananda and others, 'Dampak Kebijakan Zonasi Terhadap Ketimpangan Akses Pendidikan Dasar Di Indonesia Pada Era Digital', *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10.02 (2025), pp. 114–25.

**Tabel 2. Bentuk Ketimpangan Digital dalam Implementasi Pembelajaran Daring**

<b>Dimensi Ketimpangan</b>	<b>Bentuk Ketimpangan</b>	<b>Dampak terhadap Pembelajaran</b>
Akses	Internet tidak stabil	Partisipasi rendah
Perangkat	Tidak semua siswa memiliki gawai	Ketimpangan hasil belajar
SDM	Literasi digital guru rendah	Pembelajaran kurang interaktif
Kebijakan	Minim afirmasi sekolah tertinggal	Digitalisasi tidak merata

Tabel tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan digital merupakan fenomena sistemik yang berdampak langsung pada kualitas dan keadilan pembelajaran daring. Oleh karena itu, implementasi pembelajaran daring perlu disertai dengan kebijakan afirmatif yang berpihak pada sekolah dan peserta didik yang memiliki keterbatasan digital.

Secara keseluruhan, kajian literatur menegaskan bahwa ketimpangan digital merupakan tantangan krusial dalam transformasi pembelajaran daring. Tanpa upaya sistematis untuk mengurangi kesenjangan akses, kapasitas, dan pemanfaatan teknologi, pembelajaran daring justru berpotensi mereproduksi ketidakadilan pendidikan. Bukti empiris dari berbagai konteks menunjukkan bahwa digitalisasi pendidikan yang berkeadilan hanya dapat terwujud melalui kombinasi kebijakan infrastruktur, penguatan kapasitas guru, serta pendampingan berkelanjutan bagi sekolah yang tertinggal. Dengan demikian, pengurangan ketimpangan digital harus menjadi agenda utama dalam implementasi pembelajaran daring yang inklusif dan berkelanjutan<sup>26</sup>.

Untuk memperkuat analisis mengenai ketimpangan digital dalam implementasi pembelajaran daring, penelitian ini menyajikan tabel sintesis literatur yang merangkum hasil kajian dari berbagai sumber kredibel, baik internasional maupun nasional. Tabel ini bertujuan untuk memetakan fokus kajian, pendekatan metodologis, serta temuan utama penelitian dan dokumen kebijakan yang relevan dengan isu digitalisasi pendidikan. Selain itu, tabel ini juga menekankan keterkaitan setiap temuan dengan konteks Kabupaten Banyuwangi sebagai lokasi kajian, sehingga memperjelas posisi penelitian dalam lanskap studi yang telah ada. Penyertaan kolom akses nyata menunjukkan transparansi sumber dan memudahkan proses verifikasi akademik, sekaligus memperkuat validitas kajian literatur yang

---

<sup>26</sup> Judijanto and others.  
The 6th ICO EDUSHA 2025  
Vol. 6. No. 1 December 2025  
E-ISSN. 2775-930X

digunakan. Dengan demikian, tabel sintesis ini berfungsi tidak hanya sebagai ringkasan pustaka, tetapi juga sebagai landasan analitis untuk memahami dinamika kebijakan digitalisasi sekolah dan implikasinya terhadap ketimpangan akses pembelajaran daring di tingkat daerah<sup>27</sup>.

**Tabel 3. Sintesis Literatur tentang Digitalisasi Pendidikan dan Ketimpangan Digital**

No	Penulis & Tahun	Fokus Kajian	Metode	Temuan Utama	Relevansi dengan Banyuwangi	Akses Nyata
1	UNESCO (2020)	Digital divide pendidikan global	Laporan kebijakan	Digitalisasi tanpa pemerataan infrastruktur memperlebar ketimpangan	Banyuwangi menghadapi tantangan serupa antara sekolah kota-desa	<a href="https://unesdoc.unesco.org">https://unesdoc.unesco.org</a>
2	OECD (2021)	Kebijakan pendidikan digital	Policy review	Efektivitas digitalisasi bergantung pada kesiapan sistem & SDM	Menjadi tolok ukur evaluasi kebijakan daerah	<a href="https://www.oecd.org/education">https://www.oecd.org/education</a>
3	Kemendikbud (2021)	Transformasi digital pendidikan Indonesia	Dokumen kebijakan	LMS dan akun belajar.id sebagai tulang punggung digitalisasi	Digunakan oleh sekolah-sekolah Banyuwangi	<a href="https://belajar.id">https://belajar.id</a>
4	BPS (2023)	Akses internet rumah tangga	Survei nasional	Ketimpangan akses TIK masih tinggi di wilayah non-perkotaan	Banyuwangi memiliki variasi geografis yang memengaruhi akses internet	<a href="https://www.bps.go.id">https://www.bps.go.id</a>
5	Dinas Pendidikan Banyuwangi (2022)	Digitalisasi sekolah daerah	Laporan program	Penerapan e-learning dan CBT meningkat pascapandemi	Menjadi Objek kebijakan langsung penelitian ini	<a href="https://dispendik.banyuwangikab.go.id">https://dispendik.banyuwangikab.go.id</a>
6	Warschau	Teori	Studi	Akses teknologi tidak	Menjelaskan rendahnya	Google Scholar

<sup>27</sup> Alfi Haris Wanto and Arfi Ali Syahbana, 'Implementasi Program Banyuwangi Mengajar Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan (Studi Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi)', *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 3.2 (2017), pp. 149–59.

No	Penulis & Tahun	Fokus Kajian	Metode	Temuan Utama	Relevansi dengan Banyuwangi	Akses Nyata
	er (2004)	ketimpangan digital	teoretis	selalu berbanding lurus dengan pemanfaatan yang bermakna	dampak di sekolah tertinggal	
7	Selwyn (2016)	Critical digital education	Analisis kritis	Teknologi bersifat politis & tidak netral	Relevan dengan kontroversi kebijakan digitalisasi	Google Scholar
8	Zhang et al. (2020)	E-learning effectiveness	Meta-analisis	E-learning efektif jika didukung literasi digital	Masalah utama guru di daerah	Google Scholar

### Efektivitas Kebijakan Digitalisasi dalam Mengurangi Ketimpangan

Efektivitas kebijakan digitalisasi sekolah dalam mengurangi ketimpangan pendidikan merupakan isu sentral dalam diskursus transformasi pendidikan digital. Secara normatif, kebijakan digitalisasi dirancang untuk memperluas akses pembelajaran, meningkatkan fleksibilitas belajar, serta menjembatani keterbatasan ruang dan waktu. Namun, kajian literatur menunjukkan bahwa efektivitas tersebut tidak bersifat otomatis dan sangat bergantung pada konteks implementasi kebijakan di tingkat satuan pendidikan. Dengan demikian, efektivitas kebijakan digitalisasi perlu dianalisis secara kritis dengan mempertimbangkan dimensi struktural dan operasional.

Berbagai studi internasional menegaskan bahwa kebijakan digitalisasi sekolah cenderung lebih efektif di wilayah yang telah memiliki kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai. OECD (2021) dan UNESCO (2020) menunjukkan bahwa sekolah dengan akses internet stabil, perangkat memadai, serta guru yang memiliki literasi digital tinggi mampu memanfaatkan teknologi secara pedagogis. Sebaliknya, di sekolah dengan keterbatasan infrastruktur dan kompetensi digital, kebijakan digitalisasi sering kali hanya berfungsi sebagai formalitas administratif tanpa dampak signifikan terhadap kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan digitalisasi bersifat asimetris dan berpotensi mereproduksi ketimpangan<sup>28</sup>.

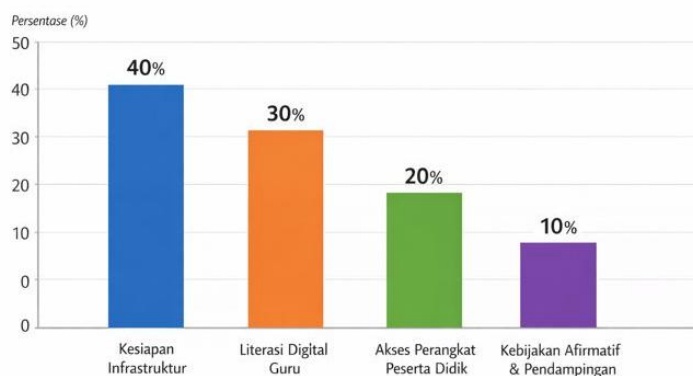
Dalam konteks Indonesia, literatur nasional menunjukkan bahwa kebijakan digitalisasi pendidikan melalui penyediaan platform nasional dan sistem pembelajaran daring belum sepenuhnya

<sup>28</sup> OECD, 'An OECD Learning Framework 2030', in *The Future of Education and Labor* (Springer, 2019), pp. 23–35.  
The 6th ICO EDUSHA 2025  
Vol. 6. No. 1 December 2025  
E-ISSN. 2775-930X

menjangkau seluruh satuan pendidikan secara merata. Program LMS nasional dan akun *belajar.id* memberikan kerangka kerja digital yang relatif seragam, namun tingkat pemanfaatannya sangat bervariasi antar daerah. Studi berbasis data BPS dan laporan Kemendikbud mengindikasikan bahwa keterbatasan akses internet dan perangkat menjadi faktor penghambat utama efektivitas kebijakan digitalisasi di wilayah non-perkotaan. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan digitalisasi belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi ketimpangan akses pembelajaran daring<sup>29</sup>.

Jika dikaitkan dengan konteks Kabupaten Banyuwangi, efektivitas kebijakan digitalisasi sekolah menunjukkan dinamika yang serupa. Laporan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi menunjukkan adanya peningkatan pemanfaatan e-learning dan ujian berbasis komputer pascapandemi. Namun, literatur dan laporan daerah juga mengungkapkan bahwa tingkat kesiapan antar sekolah tidak seragam, terutama antara sekolah di pusat kota dan wilayah pinggiran. Dengan demikian, kebijakan digitalisasi di Banyuwangi menunjukkan efektivitas parsial yang belum sepenuhnya menjawab persoalan ketimpangan digital.

Hasil sintesis kajian literatur yang divisualisasikan melalui diagram berikut ini:



**Gambar 1. Faktor Efektivitas Kebijakan Digitalisasi Sekolah**

*(Sumber Olahan Peneliti:2026)*

Diagram tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan lebih banyak ditentukan oleh kesiapan infrastruktur (sekitar 40%) dan literasi digital guru (30%), dibandingkan oleh keberadaan

<sup>29</sup> RISET KEBUDAYAAN, 'Kementerian Pendidikan', *Kebudayaan, Riset Dan Teknologi*, 2021, pp. 9–46.  
The 6th ICO EDUSHA 2025  
Vol. 6. No. 1 December 2025  
E-ISSN. 2775-930X

platform pembelajaran itu sendiri. Faktor akses perangkat peserta didik (20%) dan dukungan kebijakan afirmatif (10%) juga berperan, namun sering kali kurang mendapatkan perhatian kebijakan. Temuan ini selaras dengan berbagai studi yang menegaskan bahwa digitalisasi tanpa intervensi afirmatif cenderung menguntungkan sekolah yang sudah siap. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan digitalisasi tidak dapat dilepaskan dari strategi penguatan faktor-faktor pendukung utama.

Lebih lanjut, literatur kritis menyoroti bahwa efektivitas kebijakan digitalisasi sering kali diukur secara sempit melalui indikator administratif, seperti jumlah sekolah yang menggunakan LMS atau tingkat partisipasi dalam platform daring. Pendekatan ini mengabaikan dimensi kualitas pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Selwyn (2016) dan Warschauer (2004) menegaskan bahwa teknologi pendidikan bersifat politis dan dapat memperkuat ketimpangan apabila tidak dirancang secara reflektif dan kontekstual. Dengan demikian, pengukuran efektivitas kebijakan digitalisasi perlu bergeser dari sekadar adopsi teknologi menuju dampak pedagogis dan keadilan akses<sup>30</sup>.

Secara keseluruhan, kajian literatur menunjukkan bahwa kebijakan digitalisasi sekolah belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi ketimpangan pendidikan apabila tidak disertai dengan kebijakan pendukung yang bersifat inklusif. Efektivitas kebijakan sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur, literasi digital guru, akses perangkat peserta didik, serta keberpihakan kebijakan terhadap sekolah yang tertinggal. Bukti empiris dari berbagai konteks menunjukkan bahwa digitalisasi yang berkeadilan hanya dapat terwujud melalui kombinasi kebijakan afirmatif, pendampingan berkelanjutan, dan evaluasi berbasis konteks lokal. Digitalisasi cenderung memberikan manfaat yang lebih besar bagi sekolah yang telah memiliki kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia. Sementara itu, sekolah dengan keterbatasan justru menghadapi beban adaptasi yang lebih besar, baik dari sisi teknis maupun pedagogis. Kondisi ini menunjukkan bahwa teknologi bersifat "*memperkuat*" struktur yang sudah ada, sehingga tanpa kebijakan pendamping, digitalisasi berpotensi mereproduksi ketimpangan pendidikan. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan digitalisasi sekolah sangat dipengaruhi oleh dukungan pelatihan guru yang berkelanjutan, penyediaan infrastruktur yang merata, serta mekanisme pendampingan bagi sekolah yang tertinggal secara digital. Kebijakan digitalisasi yang hanya berfokus pada penyediaan platform teknologi tanpa penguatan kapasitas pengguna cenderung menghasilkan dampak yang terbatas<sup>31</sup>.

---

<sup>30</sup> Neil Selwyn, *Is Technology Good for Education?* (John Wiley & Sons, 2016).

<sup>31</sup> Dety Mulyanti, 'Strategi Manajemen Pendidikan Di Era Digital: Optimalisasi Infrastruktur, SDM, Dan Pembelajaran Berbasis Teknologi', *Jurnal Pelita Nusantara*, 2.4 (2025), pp. 376–83.

## Strategi Kebijakan Menuju Digitalisasi yang Inklusif

Strategi kebijakan menuju digitalisasi pendidikan yang inklusif merupakan prasyarat utama agar transformasi digital tidak berhenti pada aspek modernisasi teknis, tetapi benar-benar berkontribusi pada pemerataan dan keadilan pendidikan. Digitalisasi yang inklusif menuntut kebijakan yang tidak hanya mendorong adopsi teknologi, tetapi juga memastikan bahwa seluruh satuan pendidikan memiliki kesempatan yang setara untuk memanfaatkan teknologi tersebut. Kajian literatur menunjukkan bahwa banyak kebijakan digitalisasi pendidikan gagal mencapai tujuan pemerataan karena dirancang secara seragam tanpa mempertimbangkan keragaman kondisi sosial, geografis, dan ekonomi sekolah. Oleh karena itu, strategi kebijakan digitalisasi perlu dirancang secara kontekstual dan berbasis kebutuhan nyata satuan pendidikan.

Penguatan dan pemerataan infrastruktur teknologi merupakan strategi kebijakan paling fundamental dalam mewujudkan digitalisasi pendidikan yang inklusif. Infrastruktur yang dimaksud tidak hanya mencakup jaringan internet dan perangkat keras, tetapi juga kestabilan listrik dan dukungan teknis berkelanjutan. Literatur internasional dan nasional menegaskan bahwa sekolah yang tidak memiliki infrastruktur dasar yang memadai cenderung tertinggal dalam implementasi pembelajaran daring, meskipun kebijakan digitalisasi telah diberlakukan secara nasional. Dengan demikian, kebijakan afirmatif dalam penyediaan infrastruktur bagi sekolah di wilayah tertinggal menjadi langkah strategis untuk mengurangi kesenjangan digital<sup>32</sup>.

Selain infrastruktur, peningkatan literasi digital guru merupakan pilar utama dalam strategi digitalisasi yang inklusif. Guru memegang peran sentral sebagai aktor utama dalam menerjemahkan kebijakan digitalisasi ke dalam praktik pembelajaran sehari-hari. Berbagai kajian menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital guru menyebabkan teknologi pembelajaran hanya digunakan secara administratif, bukan pedagogis. Oleh karena itu, strategi kebijakan perlu menempatkan pelatihan, pendampingan, dan pengembangan profesional guru secara berkelanjutan sebagai bagian integral dari digitalisasi pendidikan<sup>33</sup>.

Strategi digitalisasi yang inklusif juga harus memperhatikan akses perangkat dan kesiapan peserta didik sebagai subjek utama pembelajaran. Ketimpangan kepemilikan perangkat dan keterbatasan konektivitas di tingkat rumah tangga menjadi faktor penghambat utama efektivitas pembelajaran daring. Literatur menunjukkan bahwa tanpa dukungan kebijakan berupa subsidi perangkat, bantuan kuota, atau skema pembelajaran campuran (*blended learning*), digitalisasi justru

---

<sup>32</sup> Prihatin and Sutangsa.

<sup>33</sup> Febriani Safitri and others, *Literasi Digital Dalam Dunia Pendidikan* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

memperlebar kesenjangan hasil belajar antar peserta didik. Dengan demikian, kebijakan digitalisasi perlu dirancang dengan pendekatan yang berorientasi pada keadilan sosial dan inklusi peserta didik.

Lebih lanjut, strategi kebijakan menuju digitalisasi yang inklusif menuntut adanya diferensiasi kebijakan berdasarkan tingkat kesiapan sekolah. Pendekatan kebijakan yang seragam cenderung menguntungkan sekolah yang telah siap secara digital, sementara sekolah dengan keterbatasan justru semakin tertinggal. Kajian literatur menekankan pentingnya pemetaan kesiapan digital sekolah sebagai dasar perumusan kebijakan yang adaptif dan bertahap. Oleh karena itu, strategi kebijakan digitalisasi perlu bersifat fleksibel dan responsif terhadap kondisi lokal masing-masing satuan pendidikan<sup>34</sup>.

Dalam konteks Kabupaten Banyuwangi, strategi kebijakan digitalisasi yang inklusif perlu diarahkan pada penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat. Kolaborasi lintas pemangku kepentingan memungkinkan optimalisasi sumber daya lokal dan memperkuat keberlanjutan kebijakan digitalisasi pendidikan. Literatur menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital di tingkat daerah sangat dipengaruhi oleh komitmen pemerintah daerah dalam membangun ekosistem pendidikan digital yang partisipatif. Dengan demikian, digitalisasi sekolah di Banyuwangi memerlukan strategi kebijakan kolaboratif yang tidak hanya berorientasi pada teknologi, tetapi juga pada pemberdayaan komunitas pendidikan.

Secara keseluruhan, kajian literatur menegaskan bahwa strategi kebijakan menuju digitalisasi pendidikan yang inklusif harus bersifat sistemik, afirmatif, dan berkelanjutan. Digitalisasi yang efektif tidak dapat dicapai hanya melalui penyediaan platform dan regulasi, tetapi memerlukan penguatan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kebijakan yang berpihak pada kelompok dan sekolah yang rentan secara digital. Bukti empiris dari berbagai konteks menunjukkan bahwa digitalisasi yang dirancang secara inklusif mampu berkontribusi pada pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, strategi kebijakan digitalisasi harus diposisikan sebagai instrumen keadilan pendidikan, bukan sekadar simbol inovasi teknologi.

---

<sup>34</sup> Dan Mangoki and others, *Strategi Perencanaan Pendidikan* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).  
The 6th ICO EDUSHA 2025  
Vol. 6. No. 1 December 2025  
E-ISSN. 2775-930X

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa kebijakan digitalisasi sekolah merupakan bagian integral dari agenda transformasi pendidikan yang bertujuan meningkatkan kualitas, fleksibilitas, dan relevansi pembelajaran di era digital. Digitalisasi pendidikan secara konseptual memiliki potensi besar untuk memperluas akses pembelajaran, meningkatkan efisiensi tata kelola sekolah, serta mendukung penguatan kompetensi abad ke-21 bagi peserta didik. Dalam konteks Kabupaten Banyuwangi, kebijakan digitalisasi sekolah sejalan dengan agenda modernisasi layanan publik daerah dan telah mendorong pemanfaatan berbagai platform pembelajaran daring serta sistem evaluasi berbasis digital.

Namun demikian, kajian ini juga menunjukkan bahwa implementasi kebijakan digitalisasi sekolah belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi ketimpangan akses pembelajaran daring. Ketimpangan digital masih menjadi persoalan utama yang tercermin dari perbedaan kesiapan infrastruktur, literasi digital guru, akses perangkat peserta didik, serta dukungan kebijakan afirmatif antar sekolah. Kebijakan digitalisasi yang bersifat seragam cenderung lebih menguntungkan sekolah yang telah siap secara digital, sementara sekolah di wilayah pinggiran dan peserta didik dari latar belakang sosial-ekonomi rendah berisiko semakin tertinggal.

Lebih lanjut, hasil sintesis literatur menegaskan bahwa efektivitas kebijakan digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan platform teknologi, tetapi sangat bergantung pada kesiapan ekosistem pendidikan secara menyeluruh. Tanpa penguatan faktor pendukung utama dan perencanaan kebijakan yang inklusif, digitalisasi sekolah berpotensi menjadi kebijakan simbolik yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap pemerataan dan keadilan pendidikan. Oleh karena itu, digitalisasi pendidikan perlu dipahami sebagai proses transformasi sistemik jangka panjang yang menuntut komitmen kebijakan yang berkelanjutan dan berorientasi pada keadilan sosial.

## **Rekomendasi Kebijakan**

Berdasarkan temuan dan analisis kajian literatur, penelitian ini merekomendasikan beberapa arah kebijakan strategis guna mewujudkan digitalisasi sekolah yang inklusif dan berkeadilan. Pertama, pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan afirmatif dalam penyediaan dan pemerataan infrastruktur teknologi pendidikan, khususnya bagi sekolah yang berada di wilayah pinggiran dan memiliki keterbatasan akses digital. Kebijakan ini harus mencakup penyediaan jaringan internet yang stabil, perangkat pendukung pembelajaran digital, serta dukungan teknis berkelanjutan agar

kesenjangan infrastruktur tidak menjadi penghambat utama implementasi kebijakan digitalisasi sekolah.

Kedua, peningkatan literasi digital guru harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan digitalisasi pendidikan. Program pelatihan dan pendampingan guru perlu dirancang secara berkelanjutan dan kontekstual, dengan menekankan pemanfaatan teknologi untuk penguatan pedagogi, bukan sekadar penguasaan teknis. Dengan demikian, guru dapat berperan sebagai agen transformasi digital yang mampu mengoptimalkan teknologi dalam proses pembelajaran.

Ketiga, kebijakan digitalisasi sekolah perlu mempertimbangkan akses dan kesiapan peserta didik sebagai subjek utama pembelajaran. Pemerintah daerah dan sekolah dapat mengembangkan skema bantuan perangkat, subsidi kuota internet, atau model pembelajaran campuran (*blended learning*) untuk menjamin bahwa peserta didik dari berbagai latar belakang sosial-ekonomi memiliki kesempatan belajar yang setara.

Keempat, diperlukan diferensiasi kebijakan digitalisasi berdasarkan tingkat kesiapan dan karakteristik sekolah. Pemetaan kesiapan digital satuan pendidikan perlu dilakukan secara sistematis sebagai dasar perumusan kebijakan yang adaptif dan bertahap. Pendekatan ini memungkinkan kebijakan digitalisasi lebih responsif terhadap kebutuhan nyata sekolah dan mencegah terjadinya ketimpangan implementasi antar satuan pendidikan.

Kelima, penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, sekolah, komunitas pendidikan, dan sektor swasta perlu menjadi bagian dari strategi kebijakan digitalisasi yang inklusif. Kolaborasi lintas pemangku kepentingan dapat memperkuat keberlanjutan kebijakan, meningkatkan efektivitas implementasi, serta membangun ekosistem pendidikan digital yang partisipatif dan kontekstual di Kabupaten Banyuwangi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfirdaus, Laila Kholid, And Dzunuwanus Ghulam Manar, 'Semua Berawal Dari It: Terobosan Banyuwangi Dalam Menata Ulang Tatakelola Pemerintahan', *Politika: Jurnal Ilmu Politik (Sinta 2)*, 2020
- Ananda, Rizki, Aulia Rahmi, M Ilham, And Salsabilla Julia, 'Dampak Kebijakan Zonasi Terhadap Ketimpangan Akses Pendidikan Dasar Di Indonesia Pada Era Digital', *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10.02 (2025), Pp. 114–25
- Gazali, Nadien Irfatin Nuha, And Raden Bambang Sumarsono, 'Efektivitas Kebijakan Digitalisasi Dalam Mewujudkan Pembelajaran Berkualitas Di Era Society 5.0', *Proceedings Series Of Educational Studies*, 2025
- Hariyono, Hariyono, Loso Judijanto, Charlie Baka, Ima Frima Fatimah, Purwo Haryono, And Efitra Efitra, *Literasi Digital Dan Media Dalam Dunia Pendidikan* (Pt. Green Pustaka Indonesia, 2025)
- Imroah, Siti, Atik Uminatur Rofi'ah, And Ima Royani, *Teori Inovasi Dalam Pendidikan* (Pt Arr Rad

- Pratama, 2025)
- Irawan, Edi, Syaiful Arif, Arif Rahman Hakim, Ulum Fatmahanik, Wirawan Fadly, Sofwan Hadi, And Others, *Pendidikan Tinggi Di Masa Pandemi: Transformasi, Adaptasi, Dan Metamorfosis Menyongsong New Normal* (Zahir Publishing, 2020)
- Judijanto, Loso, Tika Santika, Nurjanah Nurjanah, Wawan Suwandi, Sulaeman Sulaeman, And Risky Diya Amalia Rais, *Transformasi Pendidikan: Menghadapi Era Digital Di Ruang Belajar* (Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025)
- Kebudayaan, Riset, 'Kementerian Pendidikan', *Kebudayaan, Riset Dan Teknologi*, 2021, Pp. 9–46
- Kristanto, Yosep Dwi, And Russasmita Sri Padmi, 'Analisis Data Kualitatif: Penerapan Analisis Jejaring Untuk Analisis Tematik Yang Cepat, Transparan, Dan Teliti', 2020
- Lestari, Cendy, Rahma Dini Pratiwi, Dimas Julian Pratama, And Sani Safitri, 'Kesenjangan Digital Dan Dampaknya Terhadap Pendidikan', *Risoma: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 3.4 (2025), Pp. 1–16
- Ma, Analisis Model Layanan Terpadu L P, 'Journal Of Scientech Research And Development', *Journal Of Scientech Research And Development*, 7.1 (2025)
- Mangoki, Dan, Mutoharoh Mutoharoh, Loso Judijanto, Tamsin Yoiooga, And Ngurah Ayu Nyoman Murniati, *Strategi Perencanaan Pendidikan* (Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025)
- Mansyur, M, *Pendidikan Menuju Era Society 5.0 Revolusi Digital Abad 21: Belajar Berpikir Kritis, Kreatif Dan Inovatif Membentuk Karakter Siswa* (Deepublish, 2025)
- Mawaddah, Nurul, Nirmala Dewi, Muhammad Rifai, And Muchdir Ahmad Ronoatmojo, 'Optimalisasi Pembelajaran Daring Dalam Meningkatkan Akses Pendidikan Di Daerah Terpencil', *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8.2 (2025), Pp. 1399–1408
- Mohamed Hashim, Mohamed Ashmel, Issam Tlemsani, And Robin Matthews, 'Higher Education Strategy In Digital Transformation', *Education And Information Technologies*, 27.3 (2022), Pp. 3171–95
- Mulyanti, Dety, 'Strategi Manajemen Pendidikan Di Era Digital: Optimalisasi Infrastruktur, Sdm, Dan Pembelajaran Berbasis Teknologi', *Jurnal Pelita Nusantara*, 2.4 (2025), Pp. 376–83
- Mustari, Mohamad, *Manajemen Pendidikan Di Era Merdeka Belajar* (Prodi S2 Studi Agama-Agama Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2022)
- Nikmatul Hikmah, Niken Lufi Anggini, & Nur Anim Jauhariyah. (2024). *Digital Transformation In Education Financing: Opportunities And Challenges In The Era Of Technological Disruptions*. *Ico Edusha*, 5(1), 132–156. Retrieved From <https://Prosiding.Stainim.Ac.Id/Index.Php/Prd/Article/View/498>
- Nurhidayah, Wida, Arie Rakhmat Riyadi, And Neni Maulidah, 'Pemahaman Literasi Digital Guru Dan Implikasinya Dalam Pembelajaran Berdiferensiasi', *Elementary Journal: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 8.1 (2025), Pp. 222–28
- Oecd, 'An Oecd Learning Framework 2030', In *The Future Of Education And Labor* (Springer, 2019), Pp. 23–35
- Prihatin, Eka, Deni Kadarsah, And Ratu Dintha Izfs, *Kebijakan Pendidikan Nasional: Transformasi Digital Untuk Sistem Yang Inklusif* (Indonesia Emas Group, 2025)
- Prihatin, Eka, And S Pd Sutangsa, *Transformasi Kebijakan Pendidikan: Dari Konsep Hingga Pelaksanaan Di Era Digital* (Indonesia Emas Group, 2025)
- Putra, Mujiono Sang, 'Transformasi Pendidikan Di Era Digital Solusi Kreatif Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran', *Jpsl: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Lingkungan*, 3.2 (2025), Pp. 68–78
- Ramadhany, Ridha, Rustiyana Rustiyana, Erfina Rianty, Sentot Eko Baskoro, Inkreswari Retno Hardini, And Merri Anitasari, *Transformasi Digital Sektor Publik* (Star Digital Publishing, 2025)
- Riset, D A N Teknologi, 'Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi', *Universitas*,

1.1 (2022), P. 2

Safitri, Febriani, Ramlah Ramlah, William Sandy, And Alda Cendekia Siregar, *Literasi Digital Dalam Dunia Pendidikan* (Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025)

Selwyn, Neil, *Is Technology Good For Education?* (John Wiley & Sons, 2016)

Sumual, Shely D M, Julisa R Sambur, And Marcela Magnolia Tamtompol, 'Analisis Infrastruktur Tik Dalam Mendukung Transformasi Digital Di Satuan Pendidikan', *Edutik: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 5.6 (2025), Pp. 2463–70

Van Dijk, Jan, *The Digital Divide* (John Wiley & Sons, 2020)

Wanto, Alfi Haris, And Arfi Ali Syahbana, 'Implementasi Program Banyuwangi Mengajar Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan (Studi Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi)', *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 3.2 (2017), Pp. 149–59